

**PENGEMBANGAN AGROPOLITAN DALAM PERSPEKTIF LOCAL
ECONOMIC RESOURCES DEVELOPMENT DI KABUPATEN
SUMENEP (STUDI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN SUMENEP)**

***AGROPOLITAN DEVELOPMENT FROM THE PERSPECTIVE OF LOCAL
ECONOMIC RESOURCES AGRICULTURAL SECURITY SERVICE)***

Oleh :

Moh. Alifia Mukti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Wiraraja

E-mail : alifiamukti99@gmail.com

Abstract

Agropolitan development in Sumenep district through a superior commodity, namely shallots, experiences a long marketing flow starting from farmers to middlemen then to large collectors then to retail sellers and then to consumers, even though it is a superior commodity, at the local level there are market chains that need to be handled so that Stable prices This research aims to find out how agropolitan development is from a local economic resources development perspective in Sumenep district. The method in this research uses a qualitative approach with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is, collection. data, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The conclusions of this research are (1) governance, at the district level, the development of agropolitan areas has been established which has been stipulated in the Decree of the Regent of Sumenep number 188/37/KEP/435.013/2011. The Department of Agriculture as the representative for the development of agropolitan areas in the working group assisted by the Balai Rubaru sub-district agricultural instructor, (2) agricultural shallots from farmers are processed into sales and then marketed through the Permata Indah Rubaru Joint Business Group, (3) target groups, shallot farming communities and shallot business actors, (4) location factors, Shallot plants in Rubaru are more disease resistant during the rainy season and are very compatible with natural factors in Rubaru sub-district, (5) linkages and policy focus, regional regulations number 12 of 2013 and Regent's Decree Number 188/37/KEP/435.013/2011 as the focus policy and the Department of Agriculture, which plays a technical role, also provides forum and practical training in the field, assisted by the Rubaru Agricultural Extension Center (6) for sustainable development, through optimizing joint business

Keywords: Agropolitan Development, Local Economic Resources Development, Sumenep Regency

Abstrak

Pengembangan agropolitan di kabupaten sumenep melalui komoditas unggulan yaitu bawang merah mengalami alur pemasaran yang Panjang mulai dari petani ke tengkulak lalu ke pengepul besar lalu ke penjual eceran dan baru sampai ke konsumen, walaupun menjadi komoditas unggulan namun di tingkat lokal terdapat mata rantai pasar yang perlu ditangani sehingga harga stabil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan agropolitan dalam perspektif *local economic resources development* di kabupaten sumenep, metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) tata pemerintahan, di tingkat kabupaten telah terbentuk pengembangan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan dalam SK Bupati sumenep nomor 188/37/KEP/435.013/2011 Dinas Pertanian sebagai wakil pengembangan kawasan agropolitan dalam kelompok kerja yang dibantu oleh Balai penyuluh pertanian kecamatan rubaru, (2) bawang merah hasil pertanian dari petani diproses menjadi produk sampai ke pemasaran melalui Kelompok Usaha Bersama Permata Indah Rubaru, (3) kelompok sasaran, masyarakat petani bawang merah dan pelaku usaha bawang merah, (4) faktor lokasi, tanaman bawang merah di rubaru lebih tahan penyakit pada saat musim hujan dan sangat cocok dengan faktor alam di kecamatan rubaru, (5) keterkaitan dan fokus kebijakan, peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 dan SK Bupati Nomor 188/37/KEP/435.013/2011 sebagai fokus kebijakan dan Dinas Pertanian yang berperan secara teknis juga memberikan pelatihan forum dan praktik lapangan yang dibantu oleh Balai Penyuluh Pertanian Rubaru (6) pembangunan berkelanjutan, melalui optimalisasi lahan kelompok usaha bersama yang mencakup ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kata Kunci: Pengembangan Agropolitan, *Local Economic Resources Development*, Kabupaten

1. PENDAHULUAN

Agropolitan berdasarkan asal katanya terdiri dari dua kata, yaitu Agro dan Politan. Kata Agro yang berarti pertanian dan Politan yang berarti kota, maka Agropolitan berdasarkan asal katanya berarti kota pertanian atau pertanian yang ada di kota. Agropolitan merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik, dan menghela dalam kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (Baruwadi & Akib, 2017)

Sektor pertanian juga merupakan sumber modal utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Konsep pengembangan agropolitan pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di pedesaan, melalui agribisnis yang merupakan sistem keutuhan serta saling terkait di antara seluruh kegiatan ekonomi yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya, subsistem agribisnis hilir dan subsistem jasa penunjang agribisnis yang terkait langsung dengan pertanian (Churiyah, 2006)

Agropolitan di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman

dan sistem agrobisnis.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang agropolitan memerlukan peran penting dari Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah memberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada Pemerintah Pusat. Hal ini sangat berdampak positif apabila orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program serta memiliki analisis mengenai hal apa saja yang akan terjadi di kemudian hari (Safitri, 2016).

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus pemerintahan di tingkat daerah untuk melakukan pembangunan ataupun pengembangan dalam ruang lingkup daerah, hal ini didukung dengan adanya otonomi daerah. Maka dengan adanya otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya potensi tersebut dapat dijadikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (Ristanti, 2017). Sektor pertanian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dapat mendukung

pengembangan ekonomi lokal. Konsep pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada kapasitas lokal dengan prinsip utama di dalam pengembangan ekonomi lokal adalah kerjasama melalui Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang dapat menjadi penentu keberhasilan dalam keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal dalam suatu daerah (Susanti et al., 2013).

Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan kerja sama yang dilakukan mulai dari pemerindath, dunia usaha, organisasi masyarakat dan masyarakat lokal untuk memanfaatkan secara maksimal sumber daya dala upaya mendukung upaya mendukung perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Kata kunci yang dapat diambil dalam pengembangan ekonomi lokal adalah kerjasama antara semua pihak, dan pemanfaatan sumber daya lokal secara maksimal (Sishadiyati & Wahed, 2020).

Ketertarikan Peneliti tentang pengembangan Agropolitan dalam Perspektif Local Economic Resources Development di Kabupaten Sumenep melihat adanya potensi yang dimiliki salah satu daerah yang ada di Sumenep, yaitu bawang merah, sektor pertanian ini dapat mendukung perekonomian masyarakat lokal melalui pengembangan agropolitan dengan komoditas unggulannya yaitu bawang merah. Bawang merah yang ada di Rubaru merupakan komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Sumenep dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui

pengembangan agropolitan, bawang merah yang ada di Rubaru tidak hanya dapat mendorong aktivitas ekonomi dalam sektor pertanian namun juga bawang merah ini mengandung manfaat bagi kesehatan yang memiliki nutrisi dan rendah kalori sebagai vitamin, mieral, antioksidan dan juga memiliki aroma yang tajam (Haris, 2022).

Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan agrobisnis. Dinamika dalam pengembangan agropolitan tidak lepas dari peran pemerintah yang ada di Kabupaten Sumenep. Yaitu Badan Perencanaan Daerah sebagai koordinator, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berperan secara teknis, DINas PU Bina Marga, DINas Sumber Daya Air dan DISperindag sebagai pendukung dalam pengembangan agropolitan (Haris, 2022)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep yang berperan secara teknis dalam pengembangan agropolitan juga memberikan binaan dan penyuluhan di Kecamatan Rubaru yang berupa Balai Penyuluhan Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan

daerah di bidang pertanian pada tingkat Kecamatan yang berfungsi sebagai pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 atau Permentan /OT.140/4/3012 tentang tugas pokok Balai Penyuluhan Pertanian. Pertama, menyusun program penyuluhan, kedua, melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan, ketiga, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar, keempat, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha, kelima, melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui pencontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha (Hidayat et al., 2023).

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Rubaru memiliki berbagai kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian lapangan seperti pembinaan dan pengembangan Kelompok Tani kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap (PKS) petani, dan dilaksanakan dengan berbagai metode penyuluhan seperti anjongsana perorangan/kelompok/massa, demplot, uji teknologi dan berbagai metode penyuluhan lainnya, dalam melaksanakan kegiatannya Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rubaru sering bekerja sama dengan berbagai instansi ataupun pihak lain baik di Kecamatan Rubaru, Kabupaten maupun dari luar Sumenep (Hidayat et al., 2023).

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan agropolitan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pengembangannya menurut Kabid penyuluhan yaitu masih rendahnya kualitas SDM petani dan juga membutuhkan akses pasar yang belum efektif sehingga mempengaruhi pengembangan agropolttan yang juga masih menjadi permasalahan yang berupaya untuk diatasi, dan Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di Kecamatan rubaru yang menjadi kendala menurut salah satu penyuluh pertanian lapangan yaitu akses pasar yang dari segi harga produk pada tingkat petani yang masih belum stabil dan cenderung murah akibat alur pasar yang panjang dari petani ke tengkulak kecil kemudian dari tengkulak kecil ke pengepul besar, pengepul besar ke penjual eceran dan kemudian baru sampai pada konsumen. Di sisi lain juga masih banyaknya petani yang menggunakan pupuk kimia berlebihan yang dapat membuattanah menjadi asam dan mengurangi tingkat produksi pada lahan.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti mengenai realita yang terjadi, maka peneliti bertujuan melakukan penelitian secara mendalam mengenai pengembangan sumber daya ekonomi lokal yang merupakan kegiatan penting dan melibatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menjadi potensi untuk dijadikan pendorong dalam bidang ekonomi. Pemerintah dan masyarakat dan dunia usaha yang saling bekerja sama untuk mengoptimalkan pengembangan

sumber daya ekonomi lokal. Berdasarkan Latar Belakang di atas, dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi dan juga berupaya untuk diatasi peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “pengembangan Agropolitan Dalam Perspektif *Local Economic Resources Development* di Kabupaten Sumenep”

Berdasarkan uraian diatas yang disamapaikan dalam latar belakang terkait permasalahan dalam pengembangan bawang merah ditingkat lokal, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pengembangan Agropolitan Dalam Perspektif *Local Economic Resources Development* di Kabupaten Sumenep?”

2. TINJAUAN TEORITIS

Administrasi Publik

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (1970) mendefenisikan administrasi publik adalah (1) suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, (2) meliputi tiga cabang pemerintahan, eksekuti, legislating serta hubungan antara mereka, (3) mempunyai perana penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, (4) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat, (5) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan (Pasolong, 2019).

Menurut Waldo (1971) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Sedangkan menurut Nicholas Henry (1988) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik (Pasolong, 2019).

Adminsitirasi Pembangunan

Menurut Paul Mendows (1968) adminitrasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam menetapkan kebijakan publik. Sedangkan Menurut Sondang P. Siagian (2007) administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan, didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh

suatu bangsa dan Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Anggara & Sumantri, 2016).

Menurut Sondang P. Siagian (1982) administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Anggara & Sumantri, 2016). Dalam konteks ciri-ciri administrasi pembangunan menurut Sondang P. Siagian (1979) dalam bukunya (Anggara & Sumantri, 2016) yang berjudul *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*, merumuskannya sebagai berikut:

- a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat di Negara-negara yang baru berkembang
- b. Mempunyai peran aktif dan kepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun pelaksanaan yang efektif. Bahkan, administrasi ikut serta memengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan sosial yang dirumuskan dalam proses politik.
- c. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik menurut untuk masyarakat pada masa depan atau berorientasi pada masa depan.
- d. Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Administrasi

pembangunan lebih bersikap sebagai Development Agent, yaitu merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaan yang efektif, serta sebagai kemampuan dan pengendalian instrument- instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

- e. Mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.
- f. Administrator dalam aparaturnya pemerintah juga dapat menjadi penggerak perubahan. Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecahan masalah.

Dalam bukunya (Anggara & Sumantri, 2016) yang berjudul *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik* menjelaskan tentang tujuan pembangunan sebagai (a) Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan. (b) Tujuan pembangunan tidak mengenal batas waktu pencapaiannya. Artinya, masih tetap berlaku sepanjang bangsa dan Negara tetap ada di muka bumi ini sejalan dengan berkembangnya konsep kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan Pertanian

Menurut Mosher (1966) pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengolah dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan

dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya (Purukan et al., 2021). Menurut Van Aersten (1953) pertanian adalah digunakannya kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan atau hewan (Purukan et al., 2021).

Hadisapoetro (1975) mengemukakan bahwa pembangunan pertanian menghasilkan perubahan-perubahan (1) dalam susunan kekuatan dalam masyarakat, (2) dalam produksi, produktivitas dan pendapatan, (3) dalam alat-alat bahan produksi, (4) dalam tujuan ekonominya dari subsistem ke komersial, dan (8) dalam corak sosial dan tertutup ke arah terbuka.

Pembangunan pertanian berkepanjangan pada perubahan-perubahan pertanian dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat pertanian maupun masyarakat pada umumnya (Yuwono et al., 2011) hal ini juga dikemukakan oleh A.T Mosher pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral dari pada pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Pembangunan pertanian memberikan sumbangan kepadanya serta menjamin bahwa pembangunan

menyeluruh akan benar-benar bersifat umum yang bidangnya mencakup penduduk yang hidup dengan bertani (Sudalmi, 2010) **Local Economic Development**

Menurut World Bank Pengembangan ekonomi lokal sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, dunia usaha, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal bertujuan untuk membangun kapasitas ekonomi dari suatu lokasi sebagai dasar untuk memperbaiki masa depan ekonomi dan kualitas kehidupan seluruh anggota masyarakat. Blakely and Bradshaw juga mendefinisikan tentang Pengembangan Ekonomi Lokal adalah proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Hamper sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rodriguez-pose dan Tijmstra Pengembangan Ekonomi lokal merupakan proses partisipatif pada wilayah tertentu dan mendorong kemitraan antara dunia usaha lokal dengan pemerintah, memungkinkan perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan bersama yang menggunakan sumber daya lokal dan keunggulan kompetitif untuk merangsang kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang layak (Sudharsono, 2022).

Menurut Zaaier dan Sara (1993) Pengembangan Ekonomi lokal adalah proses dimana pemerintah daerah dan atau kelompok komunitas mengelola sumber daya mereka dan melakukan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan pekerjaan baru untuk merangsang kegiatan ekonomi pada suatu wilayah ekonomi (Sudharsono, 2022). Menurut A. H. J. Helmsing (2001) Pengembangan Ekonomi lokal adalah suatu proses di mana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Secara singkat disampaikan oleh Timothy J. Bartik (2003) Pengembangan Ekonomi Lokal adalah peningkatan kapasitas ekonomi lokal untuk menciptakan kesejahteraan bagi penduduk lokal (Sudharsono, 2022).

Local Economic Resources Development

Local Economic Resources Development adalah pengembangan sumber daya ekonomi lokal yang merupakan turunan dari pengembangan ekonomi lokal. Said (2012) menjelaskan bahwa Local Economic Resources Development lebih menitik beratkan pada usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan suatu ekonomi wilayah (Ariyani, 2016). Menurut FAO (1995) Sumber daya dalam hal ini meliputi sumber daya alam

dan sumber daya manusia dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki antara sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mengoptimalkan suatu pengembangan daerah dan di tingkat lokal (Rachmawati, 2010). Menurut Blakely (1990) Pengembangan sumber daya ekonomi lokal adalah kegiatan ekonomi yang menekankan pada sumber daya lokal atau setempat. Dapat berupa usaha atau kegiatan yang sedang dirintis pengembangannya, pengembangan sumber daya ekonomi lokal merupakan isu terbaru dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan wilayah melalui pengembangan usaha (kecil dan menengah utamanya) karena lebih mengandalkan pada bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal sehingga dipandang tidak rentan terhadap krisis ekonomi. Pengembangan ekonomi lokal menaruh perhatian pada pengembangan kelembagaan baru berbasis lokal yang mampu menggerakkan masyarakat kedalam marketplace dan lebih menempatkan kelompok masyarakat disbanding individual pada pusat sistem ekonomi dan mampu menciptakan tenaga kerja (Rachmawati, 2010).

Fokus dalam penelitian ini yaitu (1) tata pemerintahan, Pemerintah Daerah Merupakan salah satu aktor penting dalam konsep LERD, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pembangunan dalam penyediaan pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia serta mengkoordinir pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah, dan menyesuaikan dengan regulasi atau

kebijakan yang tepat sebagai dasar hukum pelaksanaannya. (2) proses manajemen, Proses manajemen merupakan usaha yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menunjang dalam pencapaian secara sistematis. Dalam proses manajemen terdapat input, proses dan output yang ketiga langkah tersebut memiliki fokus masing-masing yang harus dipahami oleh semua aktor yang bersangkutan dalam konsep LERD. (3) kelompok sasaran Kelompok sasaran merupakan obyek kebijakan. Namun, tidak semua kelompok sasaran harus menerima posisi obyek, ada saat tertentu di mana kelompok sasaran juga berperan sebagai subyek sebuah kebijakan. Kelompok sasaran menjadi penentu kesuksesan LERD. Karena kelompok ini menjadi pelaksana akhir dari program atau kebijakan yang ada, bersama pemerintah selaku pembuat kebijakan. Kelompok sasaran harus memiliki pola komunikasi yang baik dengan pemerintah agar program yang dibuat dan proses pelaksanaannya hingga evaluasi dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga setiap kali muncul permasalahan akan bias diselesaikan dengan cepat dan tepat. (4) faktor lokasi, (a) Akses lokasi dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut, udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energy, infrastruktur pendukung pengelolaan sumber daya alam, potensi sumber daya alam yang menjadi komoditi ekonomi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja terampil, jumlah lembaga keuangan lokal. (b) Faktor lokasi tidak

terukur untuk dunia usaha

yakni peluang kerja sama dan lembaga penelitian. (c) Faktor lokasi tidak terukur individual meliputi kualitas pemukiman, lingkungan, pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan umum, etos kerja sumber daya manusia. (5) keterkaitan dan fokus kebijakan,

(a) Perluasan Ekonomi, yaitu meliputi kebijakan investasi, promosi persaingan usaha, perusahaan daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, dan pengembangan keahlian. (b) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitas meliputi, kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan swasta dan kebijakan pengurangan kemiskinan. (c) Pembagian wilayah meliputi kebijakan kawasan industri, pusat pertumbuhan, pengembangan ekonomi, kerjasama antar daerah, tata ruang LERD, jaringan usaha antar sentra dan sistem industri berkelanjutan. (6) pembangunan berkelanjutan, konnspe pembanguna berkelanjutan dalam LERD melihat tiga unsur yaitu ekonomi, Ekonomi, yaitu sebagai upaya mempertahankan menjaga kapital agar tidak mengalami kemerosotan ketika capital tersebut dimanfaatkan keseluruhan capital yang dimaksud yaitu berupa sumber daya buatan, sumber daya alam, sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial.sosial, Sosial, yaitu sebagai upaya yang lebih menekankan pada peningkatan segi kualitas dari pada aspek pertumbuhan yang bersifat kuantitas. Seperti adanya kombinasi dari hubungan sosial, identitas budaya, pengembangan

kelembagaan, kepercayaan hukum, disiplin dan moralitas yang akan menciptakan tercapainya keberlanjutan sistem sosial dengan bantuan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dan secara sistematis. lingkungan, Lingkungan, yaitu sebagai upaya yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia di bumi yang ditentukan oleh keberadaan dan kualitas lingkungan manusia dalam beraktivitas harus mempertimbangkan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga menuntut manusia maupun belajar untuk hidup selaras dan tidak melawan hukum lingkungan

Pengembangan Agropolitan

Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni budaya, politik, pertahanan keamanan, kehidupan beragama, kepemudaan dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan). Menurut Mahi (2014) agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pertanian sektor berbasis perdesaan dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja (Mahi, 2016). Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan McDouglass dan Friedmann (1974) sebagai siasat untuk pengembangan perdesaan. Konsep ini pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan atau dengan istilah yang digunakan oleh Friedmann kota ladang. Dengan demikian, petani masyarakat desa desa

tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, baik pelayanan yang berhubungan dengan produksi dan pemasaran maupun masalah yang berhubungan dengan kebutuhan sosial budaya dan kehidupan setiap hari, pusat pelayanan diberikan pada setingkat desa, sehingga sangat dekat dengan permukiman petani. Baik pelayanan mengenai teknik berbudidaya pertanian maupun kredit modal kerja dan informasi pasar. (Mahi, 2016). Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota atau modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Ini berarti tidak mendorong mereka untuk tinggal di tempat dan menanamkan modal di daerah perdesaan karena kebutuhan-kebutuhan dasar (lapangan pekerjaan, akses permodalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya) telah dapat terpenuhi di desa (Mahi, 2016). Program agropolitan mengandung pengertian pengembangan suatu kawasan tertentu yang berbasis pada pertanian. Karena agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang yang mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agrobisnis sehingga dapat melayani, mendorong menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (Mahi, 2016). Menurut Davis and Goldberg (1957) pengembangan pertanian yang dilakukan di kawasan agropolitan adalah pertanian berbasis agrobisnis, istilah agrobisnis pertama kali muncul pada 1950-an, sebagai sebutan bagi

gugus industri yang berkisar pada pendayagunaan sumber daya, secara operasional agribisnis didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan produksi dan distribuso sarana produksi usaha tani, kegiatan penyimpanan, pengolahan dan distribusi komoditas pertanian (Mahi, 2016).

Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya. Dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada. Dengan kata lain, kawasan agropolitan adalah kawasan agrobisnis yang memiliki fasilitas perkotaan, pengembangan kawasan agropolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agrobisnis (Mahi, 2016).

3. METODE PENELITIAN

metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif sangat mendukung untuk menjelajahi lebih dalam terkait penelitian yang dilakukan yaitu tentang pengembangan

agropolitan di Kabupaten Sumenep dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder, dan cara pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, serta analisa data mulai dari pengumpulan data, merangkum data, menyajikan data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

4. HASIL DAN PE,NAHASAN

Pertama, tata pemerintahan, Tata pemerintahan merupakan bentuk tata kelola dalam pengembangan agropolitan di tingkat pemerintahan yang menjadi aktor penting untuk mendorong pengembangan agropolitan. Pemerintah yang memiliki wewenang dalam melakukan pembangunan berupa pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di suatu daerah. Fakta yang ditemukan dalam penelitian pengembangan agropolitan terkait tata pemerintahan dalam pengembangan agropolitan di tingkat kabupaten sudah tercantum dalam SK Bupati Nomor 188/37/KEP/435.013/2011. Di dalamnya tercantum dan terbentuk kelompok kerja pengembangan kawasan agropolitan. Pengembawang kawasan agropolitan yang tercantum didalam SK Bupati tahun 2011 tentang pengembangan kawasan agropolitan yang di ketuai oleh Badan Perencanaan Daerah dan wakil ketua adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan terdapat anggota lainnya yang juga terbentuk sebagai anggota pengembangan kawasan agropolitan.

Penelitian ini menggunakan perspektif pengembangan sumber daya ekonomi lokal. Maka pengembangan agropolitan di dalam penelitin ini menguraikan dalam bentuk pengembangan dari hulu ke hilirnya. Dan agropolitan yang diangkat adalah bawang merah varietas rubaru. Melihat pada kebijakan Bupati Sumenep melalui Surat Keputusan dalam mendorong pengembangan agropolitan yang

membentuk kelompok kerja yang telah ditetapkan, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai wakil dalam pengembangan agropolitan, Dinas Pertanian yang berperan secara teknis didalamnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan yang ada di Balai Penyuluh Pertanian Rubaru. BPP Rubaru memiliki tugas sebagai pembantu Dinas pertanian yang ada di Lapangan. Balai Penyuluhan Pertanian Rubaru sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lokal yaitu kecamatan Rubaru, senantiasa memberikan pendampingan serta pembinaan mengenai berbudidaya bawang merah, mereka berperan secara teknis dilapangan yang membantu Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian yang berada di tingkat Kabupaten sedangkan Balai Penyuluh Pertanian Rubaru berada di tingkat Kecamatan. Fakta yang terjadi dilapangan peneliti menemukan yang namanya kelompok usaha bersama yang bernama Permata Indah Rubaru, KUBE PIR ini berlokasi di Desa Mandala, merupakan kelembagaan usaha yang dimiliki oleh masyarakat lokal sendiri, yaitu petani. Dan kelompok usaha ini di miliki oleh se Kecamatan rubaru kelompok tani. Dalam membangun kelompok usaha bersama PIR, masyarakat lokal dibantu oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Pertanian. mereka memberikan binaan kepada masyarakat terkait membentuk kelembagaan yang baik, aktivitas kerja sama ini tidak hanya melihat aktor pemerintah, namun peran masyarakat juga diperlukan. Data yang didapat oleh peneliti menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terkait binaan pemerintah

sehingga mereka mampu membentuk kelembagaan usaha yang mewadahi hasil pertanian bawang merah dari hulu ke hilirnya.

Gambar 1.1
Sk Bupati Sumenep
No
188/37/KEP/435.01
3/2011



NO	KEDUKULAN	JABATAN/URUTAN DALAM DINAS
1.	PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP	Bupati Sumenep
2.	PEMERINTAH KECAMATAN RUBARU	Kepala Desa Mandala
3.	KETUA KUBE PIR	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
4.	KELOMPOK KERJA (PIR)	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5.	KELOMPOK KERJA (PIR)	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6.	KELOMPOK KERJA (PIR)	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7.	KELOMPOK KERJA (PIR)	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8.	KELOMPOK KERJA (PIR)	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9.	KELOMPOK KERJA (PIR)	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10.	KELOMPOK KERJA (PIR)	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11.	KELOMPOK KERJA (PIR)	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sumber : Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Kabupaten Sumenep

agropolitan menurut Mahi (2016) merupakan pengembangan kawasan yang berbasis pertanian. serta tumbuh dan berkembang yang dapat mempengaruhi usaha agrobisnis yang dapat mendorong pembangunan pertanian. dilihat dari hasil penelitian maka hal ini selaras dengan temuan peneliti dilapangan bahwa kecamatan rubaru memang kawasan yang berbasis pertanian dan masyarakatnya pun memiliki kelembagaan usaha bersama yaitu Permata Indah Rubaru yang mampu membangun pertanian dan mendorong kegiatannya dari hulu ke hilir. Melihat pada titik fokus penelitian ini menekankan bahwa menurut Said (2012) tata pemerintahan merupakan aktor yang berperan penting dalam konsep pengembangan sumber daya ekonomi lokal, di mana pemerintah melakukan pembangunan

fisik, pembangunan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam. Hasil data menunjukkan bahwa pembangunan fisik yang ada dalam pengembangan hasil pertanian bawang merah yaitu adanya PIR yang merupakan binaan

dari pemerintah, dan pembangunan sumber daya manusia yang berupa bentuk pelatihan forum serta pelatihan praktik dilapangan, dan adanya pengelolaan sumber daya alam yaitu kelompok usaha bersama yang menjadi binaan pemerintah merupakan suatu pengelolaan sumber daya alam yaitu pertanian bawang merah dalam bentuk hilirisasi.

Dari tata pemerintahan dalam pengembangan sumber daya ekonomi lokal cukup berjalan baik. mulai dari Dinas pertanian lalu ke PPL dan ke masyarakat. Dalam kaitanya dengan pengembangan agropolitan yang didasarkan pada basis pertanian untuk mengembangkan kawasan guna mencapai pembangunan pertanian yang lebih terarah dan lebih baik.

Kedua, Proses manajemen dilakukan dalam upaya pencapaian suatu tujuan sebagai penunjang. Dalam hal ini peneliti menyajikan data bagaimana proses manajemen dilapangan jika dalam perspektif pengembangan sumber daya ekonomi lokal. Yang terdapat input, proses dan output. Adanya kelompok usaha bersama yaitu Permata Indah Rubaru sebagai wadah hilirisasi, mereka mengambil bahan mentah bawang merah dari petani lokal, dan pihak KUBE dengan petani mencari jalan keuntungan

bersama dimana petani dan pihak KUBE sama sama diuntungkan dengan cara negosiasi secara kesepakatan antara kedua pihak, disini dapat dilihat bahwa petani ataupun KUBE mereka berusaha saling sama- sama menguntungkan.

Pada proses hulu ke hilir bawang merah, dimananya hulunya terletak pada petani bawang merah sebagai penyedia bahan bakunya yaitu bawang merah, sedangkan hilirnya terletak pada kelompok usaha bersama yaitu Permata Indah Rubaru yang menjadi tempat pengolahan bawang merah serta bentuk penjualannya melalui shoppe ataupun ekspor yang juga biasa disebut sebagai hilirisasi. Adanya kelompok usaha bersama yaitu permata indah rubaru menjadi kelembagaan petani yang dapat mendorong pembangunan pertanian untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat lokal, dimana dengan adanya kelompok usaha bersama mendorong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dari hasil pertanian bawang merahnya.

Gambar 1.2

Proses Produksi olahan Bawang Merah



Sumber : BPP Rubaru

Gambar 1.3

Akun PIR di Shoppe pemasaran online



Sumber : Permata Indah Rubaru
Gambar 1.4

Produk Olahan Bawang Merah



Sumber : BPP Rubaru

Menurut David and Goldberg (1957) pengembangan pertanian dilakukan dikawasan agropolitan yang berbasis pada agrobisnis, agrobisnis merupakan istilah untuk industri yang berkisar pada pendayagunaan sumber daya, kegiatan penyimpanan, pengolahan dan distribusi komoditas pertanian. fakta yang ditemukan oleh peneliti dari proses manajemen, dimana kecamatan rubaru sebagai kawasan agropolitan yang juga memiliki basis agrobisnis yaitu kelompok usaha bersama PIR yang menjadi kegiatan penyimpanan bawang merah, pengolahan, dan distribusi komoditas unggulan bawang merah.

Peneliti mengaitkan proses manajemen ini dengan yang dikemukakan oleh Mosher (1966) yaitu pertanian suatu bentuk produksi yang

didasarkan pada tumbuhan atau hewan dan petani mengolah tanaman tersebut dalam suatu usaha tani, sebagai kegiatan produksi. Sehingga pengeluaran dan pendapatan cukup penting. Dengan adanya PIR, masyarakat petani yang tergabung didalamnya adalah sebagai bentuk produksi yang didasari pada tumbuhan bawang merah dalam suatu usaha tani untuk kepentingan pendapatan, begitupun dengan

petani, menjual hasil pertaniannya ke pihak PIR untuk kepentingan pendapatan yang didasari pada tumbuhan bawang merah. Pada titik fokus proses manajemen menurut Said (2012) adalah sebagai penunjang pencapaian tujuan yang didalamnya terdapat input, proses dan output. Dapat di lihat dari hasil penelitian, bahwa input atau masukan bawang merah didapatkan dari petani, yang kemudian di proses di dalam kelompok usaha bersama yaitu PIR untuk dijadikan bahan olahan sehingga menghasilkan output yaitu produk dan penjualan yang dapat menambah nilai jual dari hasil bawang merah.

Ketiga, Dari hasil penelitian yang menjadi kelompok sasaran yaitu pelaku usaha dan masyarakat petani bawang merahnya, mereka merupakan penghasil komoditas unggulan yang berada di lokasi agropolitan yaitu kecamatan rubaru. Mereka yang menjadi sasaran pemerintah untuk dikembangkan agar pengembangan agropolitan benar-benar menggunakan pendekatan perdesaan dengan mengembangkan

sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya. Disini peneliti ingin mengungkapkan bagaimana kondisi hubungan antar petani antar petani sebagai kelompok sasaran. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang baik yaitu mereka mengadakan perkumpulan, karena setiap kelompok tani ada jadwal perkumpulannya masing-masing. Disana mereka mendiskusikan terkait budidaya bawang merah.

Sedangkan dari pihak KUBEnya menurut salah satu pengakuan dari masyarakat yang tergabung didalamnya, mereka berharap adanya pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk studi banding dengan koperasi yang lebih maju darinya, mereka menunjukkan keinginannya bahwa kedepannya harus lebih maju. Sedangkan pelayanan yang diberikan oleh PPL kepada masyarakat petani sudah cukup bisa dikatakan baik, hal ini didapatkan dari pengakuan masyarakat terhadap kinerja PPL bahwa mereka ketika dihubungi oleh masyarakat cukup merespon dengan baik dan cepat sehingga masyarakat merasa terbantu ketika mengatasi permasalahan terkait budidaya bawang merah.

Tabel 1.1

Kelembagaan petani di Kecamatan Rubaru

NO	KETERANG AN	JUMLAH
1	Kelompok Tani	359
2	Gabungan Kelompok Tani	11
3	Kelompok Usaha Bersama	1

Sumber : BPP Rubaru

Jika dikaitan dengan yang dikemukakan oleh Mosher (1966) pertanian merupakan kegiatan manusia untukmemperoleh hasil yang berasal dari tumbuh- tumbuhan yang dijalani dengan sengaja untuk mengembangbiakkan tumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani mengadakan perkumpulan agar mereka berdiskusi dan membahas tentang tumbuhan yaitu bawang merah, supaya dalam berbudidaya serta mengembangkan bawang merah sebagai komoditas unggulan, dan dari sisi KUBEnya mereka menginginkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik kedepannya dengan mendasarkan pada hasil tumbuhan-tumbuhan yang merka produksi secara sengaja.

Sedangkan fokus pada titik ini Said (2012) menekankan bagaiman pola komunikasi pemerintah dengan kelompok sasaran, dari hasil peneltian menunjukkan bahwa pola komunikasi kelompok sasaran petani melalui perkumpulan yang diadakan, sedangkan PPL juga ikut hadir dalam perkumpulan tersebut untuk memberikan arahan dan binaan, serta ketika masyarakat petani kesulitan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam berbudidaya bawang merah, PPL merespon dengan baik dan cepat, serta senantiasa membantu petani, hasil ini dapat dikatakan bahwa hubungan diantara mereka cukup terjalin baik.

Keempat, faktor lokasi, Faktor

lokasi merupakan pendukung dalam mengembangkan suatu wilayah mulai dari sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan bahwa, faktor lokasi dikecamatan rubaru sebagai sentra bawang adalah karena faktor alam yang mereka miliki cukup mendukung dalam berbudi daya bawang, Berdasarkan penjelasan dari koordinator penyuluh menyampaikan bahwa, sisi tanah yang ada di kecamatan rubaru memang terdapat kemiringan, sehingga saat musim hujan tiba, air tidak tergenang dalam lahan sawah pertanian bawang, hal ini juga menjadi pendorong penyebab bawang merah varietas rubaru mampu bertahan dan ditanam pada musim hujan. Selain sumber daya alam, masyarakat di kecamatan rubaru rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, sehingga perhatian pemerintah kepadanya cukup serius untuk dijadikan lokasi agropolitan, melihat kecamatan rubaru sebagai sentranya bawang dan juga bawang merah menjadi komoditas unggulan. Sedangkan dari kualitas bawang merahnya, juga disampaikan langsung dari hasil penelitian, bahwa pengakuan dari masyarakat lokal mengatakan bawang merah disana tidak berubah rasanya, kualitasnya cukup bagus dan yang terpenting tentunya bawang merah sangat cocok untuk ditanam disana, bahkan ada yang menganggap bahwa tanaman bawang merah bagi mereka jenis tanaman yang unik, dan mereka betul betul memperhatikan mulai dari

penanamannya, proses pertumbuhannya, hingga panen.

Gambar 1.5 Bawang Merah Rubaru



Sumber : data peneliti

Tabel 1.2 Jenis Tanaman di kecamatan
Rubaru

Tanaman pangan	Hortikultura
Padi	Bawang merah
Jagung	Cabai rawit
Ubi kayu	mentimun
Ubi jalar	
Kacang tanah	

Sumber : BPP Rubaru

Jika dikaitkan dengan konsep *local economic resources development* yang dari Said (2012) merupakan pengembangan sumber daya lokal dimana pengembangan dalam suatu wilayah ini lebih mengoptimalkan potensi yang betul-betul dimiliki oleh daerah itu sendiri untuk dikembangkan dan mendorong aktivitas ekonomi ditingkat lokal. Maka dalam hal ini peneliti ingin menunjukkan dengan merujuk pada hasil penelitian, bahwa kecamatan rubaru yang menjadi sentra bawang merah betul betul dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga dapat mendorong kegiatan pertanian masyarakat rubaru.

Dalam pengembangan sumber daya ekonomi lokal salah satu yang menjadi

faktor lokasi menurut Said (2012) yaitu infrastruktur pengelolaan sumber daya alam dan potensi sumber daya alam yang menjadi komoditi ekonomi, dalam hal ini ditunjukkan dari adanya hasil penelitian yaitu infrastruktur pengelolaan sumber daya alam adalah dengan adanya kelompok usahab bersama yaitu Permata Indah Rubaru sebagai wadah dalam pengelolaan bawang merah. Dan komoditi ekonomi di kecamatan rubaru adalah tanaman bawang merah, jenis tanaman ini sudah menjadi khas rubaru karena disana merupakan sentra bawang dan komoditas unggulanny adalah bawang.

Pada fokus ini sebenarnya menunjukkan adanya potensi yang dimiliki oleh daerah rubaru sebagai sentra bawang, tanaman jenis bawang merah ini sangat cocok ditanam pada musim kemarau dan musim hujan disana, dari kualitas bawang yang dihasilkan cukup bagus membuat pemerintah memiliki perhatian terhadap daerah kecamatan rubaru sebagai lokasi agropolitan.

Kelima, Keterkaitan dan fokus Kebijakan, Kebijakan menjadi dasar pemerintah dalam membangun serta melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah. Fokus kebijakan dalam pengembangan agropolitan di kabupaten sumenep tertuang dalam SK Bupati Nomor 188/37/KEP435.013/2011 yang terbentuk kelompok kerja pengembangan kawasan agropolitan.

Dinas ketahanan pangan dan pertanian sebagai wakil dalam pengembangan kawasan agropolitan, dan Badan Perencanaan Daerah

sebagai ketua pengembangan kawasan agropolitan. Keterkaitannya Dinas pertanian yang cukup membidangi dalam halnya pertanian cukup berperan secara teknis.

Dalam mendukung pengembangan agropolitan Dinas ketahanan pangan dan Pertanian selalu memberikan binaan kepada masyarakat lokal petani kecamatan rubaru, yang juga tidak lepas dari bantuan BPP Rubaru sebagai tugas pembantu Dinas yang ada di Lapangan.

Bentuk dukungan dari Dinas ketahanan Pangan dalam pengembangan agropolitan yaitu berupa pelatihan dalam forum untuk mengenalkan kepada kelompok tani cara berbudidaya bawang merah, serta bentuk pelatihan praktik di lahan untuk lebih mendorong kelompok tani dalam bentuk praktik.

Program agropolitan menurut Mahi (2016) mengandung artian pengembangan kawasan pada basis pertanian yang dapat mendorong berkembangnya usaha agrobisnis dalam pembangunan pertanian. fakta yang menunjukkan adanya kebijakan Bupati melalui SK tahun 2011 yang membentuk kelompok kerja program pengembangan kawasan agropolitan. Hal ini dapat mendorong pembangunan pertanian yang tunjukkan dari hasil penelitian adanya usaha agrobisnis dalam binaan pemerintah yaitu Kelompok usaha bersama Permata Indah Rubaru yang dapat mendoorng pembangunan pertanian. temuan ini selaras dengan pembangunan pertanian yang dikemukakan oleh Hadisapoetro

bahwa pertanian yang didorong akan menghasilkan perubahan-perubahan berupa produksi, alat-alat dalam memproduksi, serta mendukung produktivitas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kelompok usaha bersama milik petani yaitu PIR sebagai wadah pengembangan hasil pertanian bawang merah dalam bentuk produk untuk mendukung pembangunan pertanian.

Dalam ciri-ciri administrasi pembangunan menurut Sondang P. Siagian (1979) yaitu pemerintah mempunyai peran aktif terhadap pembangunan dalam perumusan kebijakan. Administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan umum tujuan pembangunan masyarakat dalam menunjang

tujuan sosial yang dirumuskan dalam politik. Fakta yang ditemukan peneliti bahwa ciri-ciri ini termasuk dalam hasil penelitian, dimana pemerintah berperan aktif dalam pembangunan, hal ini didasarkan dengan adanya kebijakan SK Bupati tahun 2011 tentang kelompok kerja pengembangan kawasan agropolitan untuk tujuan pembangunan masyarakat. Jika ditarik pada tujuan umum pengembangan kawasan agropolitan yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong usaha agrobisnis yang berbasis kerakyatan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kelembagaan kelompok usaha bersama yang menjadi miliki petani masyarakat lokal namun dalam binaan pemerintah daerah. Dimana pemerintah dalam mengembangkan

kawasan agropolitan sudah ditetapkan dalam SK bupati 2011, dalam bentuk kelompok kerja pengembangan kawasan agropolitan.

Pada titik fokus ini juga melihat keterkaitannya dinas yang berperan secara teknis. Fakta yang peneliti temukan bahwa dinas pertanian dalam mendukung pengembangan agropolitan memberikan pelatihan dalam bentuk forum untuk belajar secara konsep dan pelatihan dilahan dalam bentuk praktik. Hal ini selaras menurut Said (2012) bahwa salah satunya keterkaitan dalam fokus ini adanya pengembangan komunitas dan pengembangan sumber daya manusia. Ditunjukkan dari hasil bahwa kelompok tani mengikuti adanya pelatihan-pelatihan berupa forum atau dilahan dalam bentuk praktik, merupakan salah satu cara dalam pengembangan komunitas serta pengembangan sumber daya manusia petani sebagai masyarakat lokal dalam konsep pengembangan sumber daya ekonomi lokal.

Keenam, Pembangunan berkelanjutan, Bentuk pembangunan berkelanjutan dari adanya pengembangan agropolitan yang peneliti temukan berupa perusahaan milik petani dalam mengelola hasil pertanian bawang merah yang bergerak secara hilirisasi. Usaha tersebut dikelola oleh masyarakat lokal sendiri dengan cara melibatkan seluruh desa.

Fakta terjadi dilapangan peneliti mengetahui hal tersebut melalui hasil wawancara yang mengatakan bahwa kelompok usaha bersama yang bernama Permata Indah Rubaru merupakan kelompok milik masyarakat lokal sendiri yaitu kelompok tani dengan melibatkan

seluruh desa yang ada di Kecamatan Rubaru, hal ini disampaikan langsung oleh ketua gavungan kelompok tani desa atau yang mengetuai dari kelompok usaha bersama tersebut, namun hal itu berada dalam binaan pemerintah dan hingga saat ini pembangunan tersebut terus berlanjut.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pengembangan kawasan agropolitanyaitu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat dengan basis kerakyatan. Hal tersebut dirasakan ;angsung oleh masyarakat lokal rubaru yang mengakui adanya peran pemerintrah cukup membantu masyarakat lokal.

Dalam konsep *local economic resources development* atau pengebangan ekonomi lokal menurut Said (2012) dimana kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat mengembangkan sumber daya atau potensi daerah. Maka fakta yang ditemukan bahwa kelompok usaha bersama tersebuta merupakan kerjasama antara masyarakat lokal dan organisasi masyarakat lokal dan dunia usaha serta pemerintah dearah dalam memberikan binaan, untuk mengembangkan potensi kecamatan yaitu bawang merah.

Jika mengaitkannya dengan tujuan pembangunan menurut (Anggara & Sumantri 2016) dalam bukunya berjudul aministrasi pembanguna teori dan praktik bahwa tujuan pembangunan tidak mengenal batas waktu pencapaian, artinya

pembanguna terus berjalan sepanjang waktu selama bangsa dan negara masih ada dimuka bumi. Dari hasil wawancara dalam penelitian disampaikan bahwa pembangunan PIR berdiri pada tahun 2021 yang sampai saat ini terus berjalan. PIR ini bergerak dalam bentuk pengolahan serta pemasarannya yang mendukung dalam pengembangan hasil pertanian bawang merah.

Pada titik fokus ini pembanguna yang berkelanjutan harus memeperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Menurut Said (2012) pembangunan berkelanjutan harus memandang aspek sosial upaya untuk menekankan pada kombinasi dan hubungan sosial. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa dengan terbentuknya kelembagan yang melibatkan seluruh desa dapat meningkatkan rasa sosial yang tinggi antara kelompok tani satu dengan yang lainnya. Dan pada aspek ekonomi dengan adanya kelembagaan kelompok usaha bersama membantu perekonomian masyarakat lokal, karena tenaga kerja didalamnya adalah masyarakat lokal sendiri. Pada segi lingkungan dimana masyarakat lokal rubaru menggunakan sumber daya alam yaitu bawang merah sebagai sumber daya untuk dikembangkan dalam menuntun manusia atau masyarakat lokal untuk mengoptimalkan lingkungan yang dapat mendukung pengembangan wilayah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari tata pemerintahan sudah didukung dalam bentuk SK Bupati Nomor 188/37/KEP435.013/2011, dan dari proses manajemen cukup menggambarkan bahwa prosesnya melibatkan beberapa pihak seperti kelompok tani, Permata Indah Rubaru dan pemerintah Dinas Pertanian, kelompok sasarannya yaitu masyarakat lokal Rubaru

atau khususnya petani bawang merah dan pelaku usaha, faktor lokasinya pun cukup mendukung untuk berbudidaya bawang merah dan menjadi daerah yang cukup menguntungkan untuk mengembangkan bawang merah karena dari faktor alam sangat mendukung, dari keterkaitannya Dinas Pertanian selalu memberikan pelatihan berupa materi dalam forum ataupun praktik langsung dilapangan dan terakhir yaitu pembangunan berkelanjutan, hal ini ditandai dengan adanya Permata Indah Rubaru yang merupakan binaan dari pemerintah Dinas Pertanian sebagai wadah dalam memproduksi hasil pertanian bawang merah untuk dijadikan varian produk menunjukkan sampai saat ini terus berlanjut mulai dari binaan pemerintah hingga produksinya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, Pengembangan Agropolitan Dalam Perspektif *Local Economic resources Development* di Kabupaten Sumenep Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok Usaha Bersama yaitu Permata Indah Rubaru perlu melakukan pembangunan yang lebih luas untuk menampung lebih banyak lagi hasil pertanian bawang merah.
- b. Perlunya akses pasar yang lebih luas, sehingga tidak hanya melalui pemasaran online atau ekspor pada saat waktu tertentu saja.
- c. Pemerintah Daerah yang telah dibentuk kelompok kerja dalam pengembangan kawasan agropolitan melalui Sk Bupati Nomor 188/37/KEP.435.013/2011 mepererat hubungan ditingkat pemerintahan melalui koordinasi untuk bersama-sama mengembangkan kawasan agropolitan.
- d. Petani yang ada di Kecamatan Rubaru tetap dibina oleh pemerintah untuk betul-betul mengembangkan daerahnya yang tidak hanya mengarah kepada peran pemerintah, namun peran masyarakat lokal juga penting dalam berpartisipasi pengembba ngan agopolitan di Kabupaten Sumenep.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik. In D. B. A. Saebani (Ed.), *Pustaka Setia* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Ariyani, N. (2016). *Pengembangan Budidaya Hortikultura Berbasis Local Economic Resources Development (Lerd)*.

- Baruwadi, M. H., & Akib, F. H. Y. (2017). Agropolitan Jagung. In A. Rahmat, D. Yusuf, & A. Pahudin (Eds.), *Ideas Publishing*. Ideas Publishing.
<https://repository.ung.ac.id/get/kar-yailmi%20ah/8130/Fitri-Hadi-Yulia-Akib-Agropolitan-Jagung-Implementasi-Kebijakan-di-Provinsi-Gorontalo.pdf>
- Churiyah, M. (2006). Model Pembanguna Pertanian Melalui Penerapan Agropolitan dan Garobisnis Dalam Meningkatkan Pembanhgunan Ekonomi Daerah. *Modernisasi*, 2(2), 49–57.
- Haris, R. A. (2022). PENGUATAN SISTEM KONTEKSTUAL D ALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE (STUDI PADA PENGEMBANGAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN SUMENEP). *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 17(1), 64–76.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Penguatan+Sistem+Kontekstual+Dalam+Collaborative+Governance+%28Studi+Pada+Pembangunan+Agropolitan+Di+Kabupaten+Sumenep+%29&btnG=
- Hidayat, S., Djafrihansah, F., Nofandi, M. B., Yaqin, S. A., Daismantag, Y. F., Prasetyo, Y. R., Waras, B., Ainiyah, A. At., Yunus, R., Verdiansyah, R., & Suwandi, A. (2023). *PROFIL BPP RUBARU*.
- Mahi, A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah Teori dan Aplikasi* (1st ed.). KENCANA (Divisi dari PRENADAMEDIA Group).
- Pasolong, H. (2019). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK* (kesembilan). Alfabeta.
- Purukan, B. N., Nayoan, H., & Pangemanan, F. N. (2021). Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Meningkatkan Swasembada Pangan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *J.Governance*, 1(2), 1–10.
- Rachmawati, R. (2010). *Pokok-pokok Pikiran Menuju Kesuksesan Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal kabupaten Purworejo*. 30–38.
- Ristanti, Y. D. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(9), 79–83.
- Sishadiyati, & Wahed, M. (2020). *Pengembangan Ekonomi Lokal* (1st ed.). CV. Mitra Abisatya.
- Sudalmi, E. S. (2010). Pembangunan pertanian berkelanjutan. *Jurnal Inovasi Pertanian*, 9(2), 15–28.
- Sudharsono, S. (2022). *Teori Pengembangan Ekonomi lokal* (Alfyandi (ed.); 1st ed.). IPN Press.
- Susanti, E. A., Hanafi, I., & Adiono, R. (2013). Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), 31–40.
- Yuwono, T., Widodo, S., Darwanto, D. H., Masyhuri, Indradewa, D., Wiyarjo, S. S.,